



RINGKASAN EKSEKUTIF

KLHS RPJMD



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030





RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi pada tahun 2020-2025, maka Pemerintah Kota Bukittinggi kembali akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi untuk periode 2025-2030. Sebelum, dilakukannya penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 maka diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi rencana pembangunan Kota Bukittinggi kedepannya. Pembuatan KLHS RPJPD ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.54/Menlhk/PKT/Pla.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Percepatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pasal 15 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa laporan KLHS bermanfaat bagi penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD. Dimana, pengintegrasian adalah dari semua muatan KLHS dimasukkan ke dalam RPJPD/RPJMD.

Proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 yaitu terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, (2) pengkajian pembangunan



berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);



13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Selain itu perlu diketahui pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi. Selanjutnya hasil KLHS yang berupa rekomendasi perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan pencapaian TPB/SDGs.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kota Bukittinggi dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Bukittinggi sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum ada data/BB



2. Kondisi Umum Daerah

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km², yang merupakan 0,06% dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh wilayah yang memiliki kelereng yang cukup terjal diantaranya adalah keberadaan Ngarai Sianok di batas barat kota. Kondisi ini menimbulkan beberapa resiko kebencanaan seperti terjadinya longsor atau gerakan tanah. Secara umum, kemiringan lereng (topografi) wilayah Kota Bukittinggi bervariasi antara topografi datar, berbukit-bukit dan terjal.

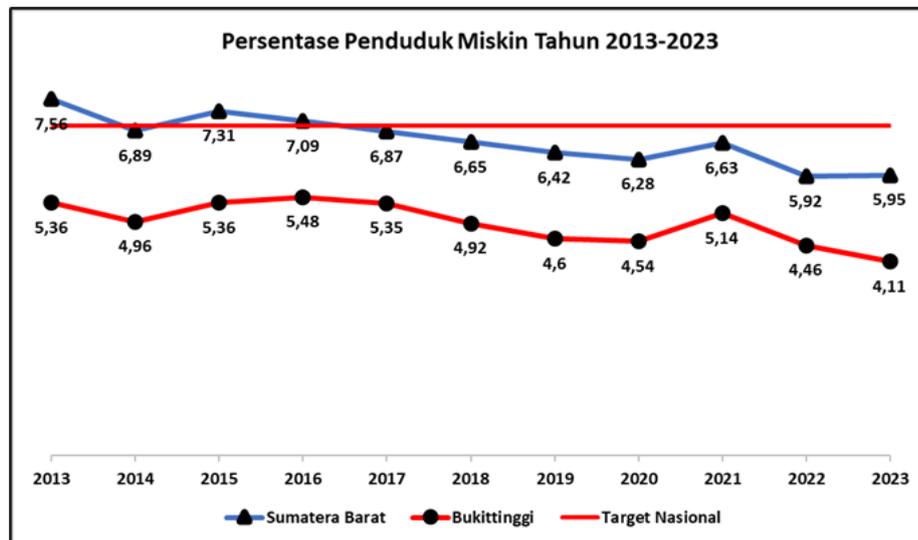
Wilayah terjal (kemiringan lereng >40%) berada di kawasan Ngarai Sianok, sementara itu daerah perbukitan (kemiringan lereng 16-40%) berada di kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (kemiringan lereng 0-15%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur.

Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2023 berdasarkan data BPS adalah 124.047 jiwa dimana laki-laki sebanyak 61.949 jiwa dan perempuan 62.098 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 jumlah penduduk mengalami penambahan sekitar 1.736 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi yakni di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 55.570 jiwa atau sebesar 44,80% dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 27.130 jiwa atau 21,87% dari penduduk Kota Bukittinggi



Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi mengalami penurunan pada tiap tahunnya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021. Akan tetapi, mengalami peningkatan Kembali pada Tahun 2022 menjadi 0,59% dari sebelumnya 0,46% tahun 2021. Pada tahun 2023 sendiri, kecamatan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,90%. Untuk kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar 1,76%.

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2022. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,35% sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 5,14%, dan kembali menurun pada tahun 2022 yaitu 4,46% dan 4,11% pada tahun 2023. Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran perkapita penduduk Kota Bukittinggi berada di atas garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.



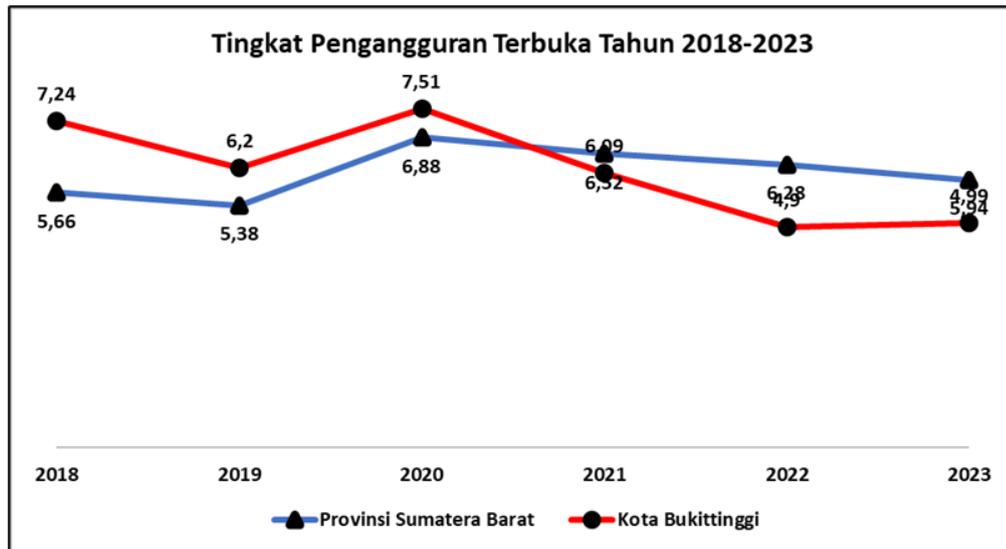
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi secara garis besar berfluktuatif dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tahun 2018 persentase TPT Kota Bukittinggi adalah 7,24%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,2%. Pada tahun 2020 angka kembali meningkat menjadi 7,51%, dan mengalami penurunan sampai tahun 2023 menjadi 4,99%. Angka pengangguran terbuka ini masih terbilang tinggi, namun sudah berada



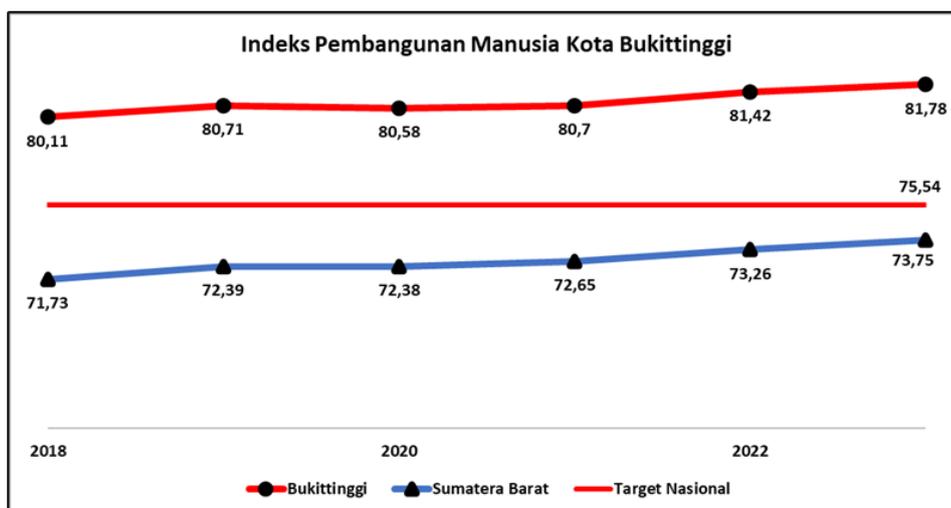
dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Pencapaian IPM Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Bukittinggi berada di urutan kedua dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.



Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

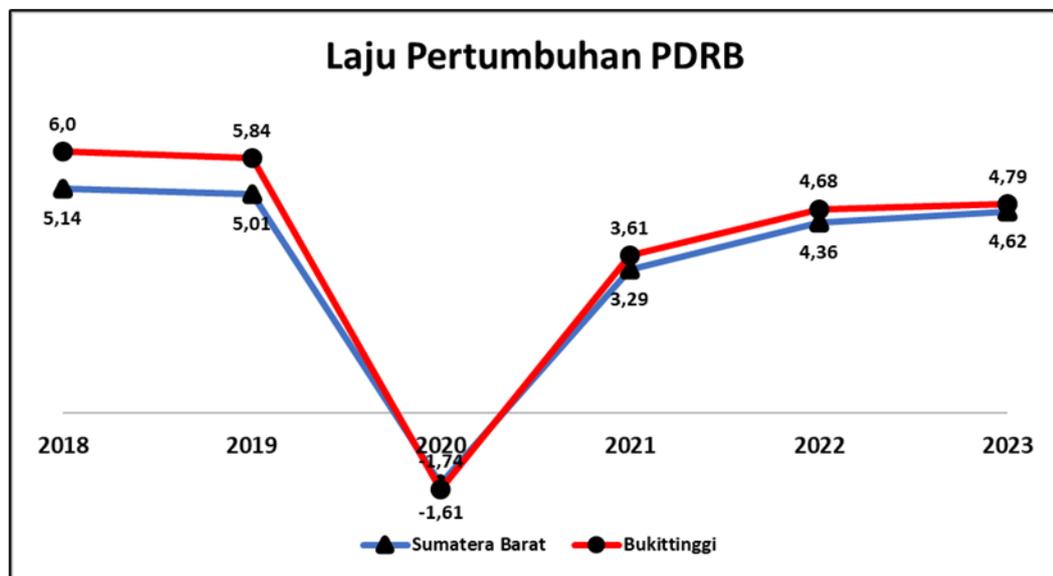


Perkembangan PDRB Kota Bukittinggi baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2018-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Seperti terlihat pada Tabel 1 terjadi peningkatan dari Rp. 5.812 M pda tahun 2018 menjadi Rp 6.869 M pada tahun 2023. Sedangkan, untuk PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dari Rp 8.011 M pada tahun 2018, menjadi Rp 11.131 M pada tahun 2023. Gambar 4 menyajikan laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bukittinggi. Laju PDRB ADHK sempat menurun sampai tahun 2020, yaitu mencapai -1,74%, dan mulai megalami peningkatan pasca covid menjadi 4,79 pada tahun 2023.

Tabel 1. PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Milliar Rupiah)	8.011	8.695	8.627	9.026	10.194	11.131
PDRB ADHK (Milliar Rupiah)	5.812	6.152	6.045	6.263	6.556	6.869
Laju Pertumbuhan (%)	6	5,84	-1,74	3,61	4,68	4,79

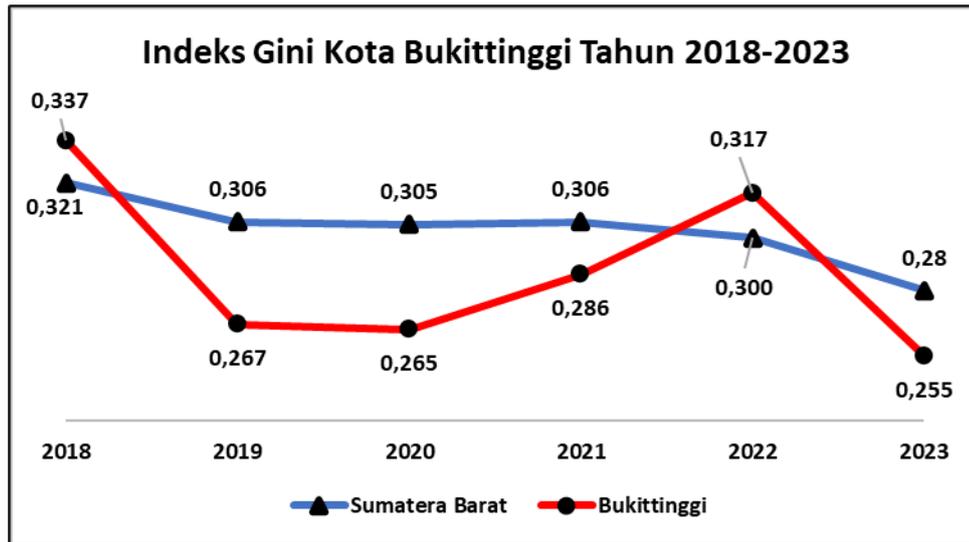
Sumber: BPS Kota Bukittinggi



Gambar 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Nilai Gini Rasio Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 0,265 – 0,337 yang tergolong dalam kategori sedang. Indeks gini Kota Bukittinggi meningkat dari tahun 2020 dari 0,265 menjadi 0, 317 pada tahun 2022, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 0,255. Meskipun, indeks gini Kota Bukittinggi berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, perhatian pemerintah tentang pemerataan distribusi pendapatan masih perlu ditingkatkan.

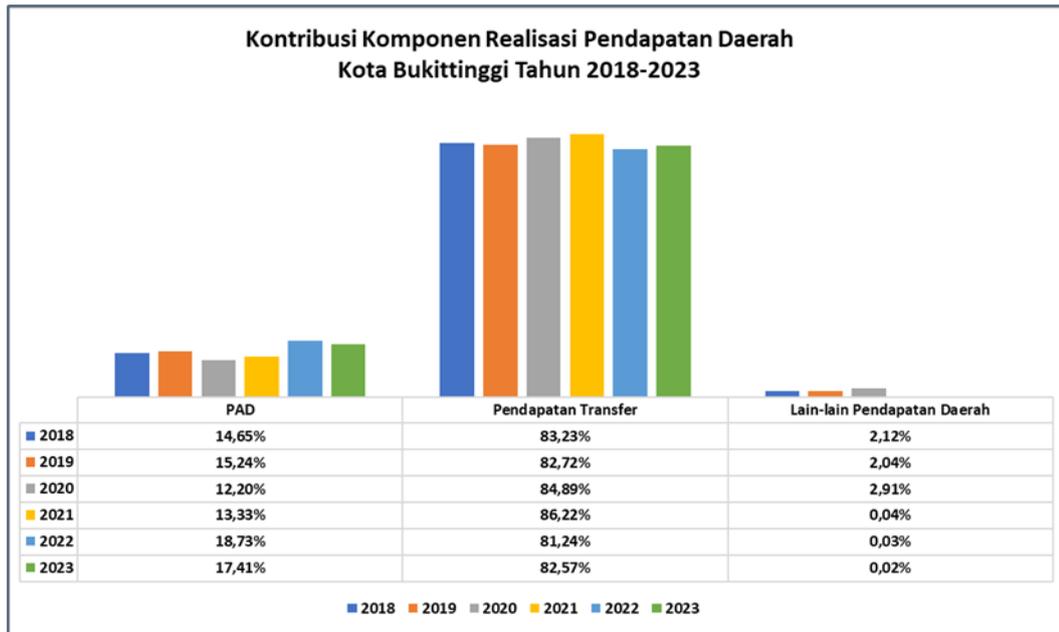


Gambar 5. Indeks gini Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bukittinggi selama 5 tahun (2018-2023) terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan anggaran rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 hingga tahun 2023 meningkat dari Rp. 695.590.867.770,61 pada tahun 2018 menjadi Rp. 706.975.448.172,65 pada tahun 2023. Rata-rata tingkat pertumbuhan anggaran selama 5 tahun hanya sebesar 0,01%. Tingkat capaian realisasi dibandingkan dengan target secara umum sudah baik yakni rata-rata sebesar 98,25%. Penurunan signifikan pendapatan terjadi pada tahun 2020 yakni pertumbuhan realisasi turun (-6,61%) dibanding tahun 2019, namun pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan realisasi sebesar 6,03% dibanding tahun 2020.

Berdasarkan kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2018-2023 didominasi oleh sumber dalam bentuk pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 83,48%, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,26% dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 1,19%. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah berkisar antara 12%-18%, dengan rata-rata 15,26%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi tergolong pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan kepada daerah. Berikut disajikan dalam Gambar 6, kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Bukittinggi.



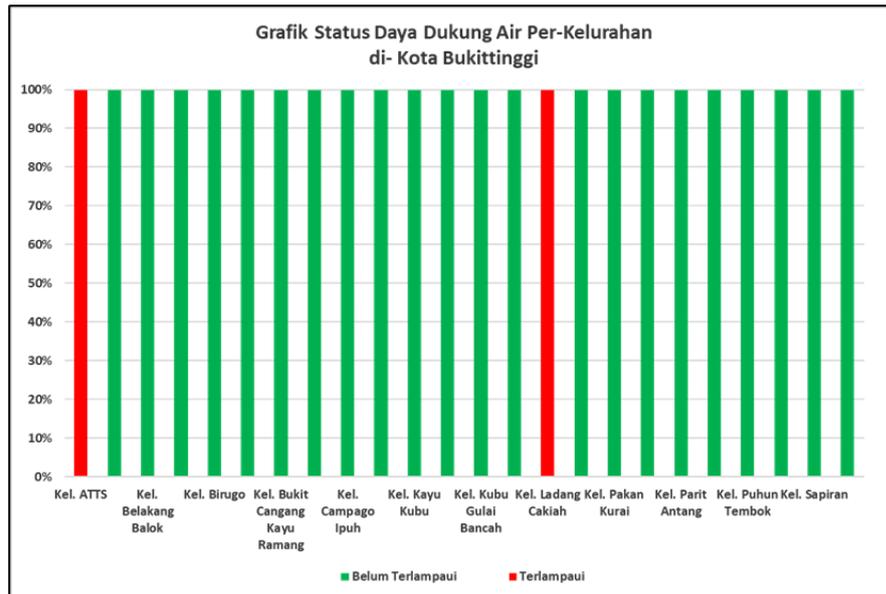
Gambar 6. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

3. Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bukittinggi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan daya dukung dan daya tampung air (D3TA) nasional dengan SK MenLHK No. 146 Tahun 2023. Analisis dilakukan dengan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan grid, hasilnya menunjukkan status D3T Air Kota Bukittinggi masih belum terlampaui untuk semua wilayah. Peta dan perhitungan D3T Air Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Grafik Status D3T Air Kota Bukittinggi, 2021

2. Daya Dukung Pangan

Sektor pertanian bukan menjadi kontribusi utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2023 hanya 1,00% dan mengalami penurunan tiap tahunnya. Untuk tanaman pangan sendiri, luas panen padi di Kota Bukittinggi menurun tiap tahunnya, dan produktivitas padi mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas padi di Kota Bukittinggi mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 63,25 kuintal/ha, dari sebelumnya 66,09 kuintal/ha pada tahun 2022. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Bukittinggi

No	Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	2012	910,00	5.471,83	60,13
2	2013	717,00	4.410,98	61,52
3	2014	783,00	5.052,70	64,53
4	2015	764,00	5.095,88	66,70
5	2016	800,10	5.227,05	65,33
6	2017	774,00	5.204,00	67,24
7	2018	934,82	5.481,12	58,41
8	2019	805,15	5.266,31	65,41
9	2020	619,95	3.776,37	60,91
10	2021			
11	2022	617,78	4.082,69	66,09
12	2023	559,68	3.540,22	63,25

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024



Melihat kondisi produktivitas padi eksisting, luas sawah yang cenderung mengalami perubahan fungsi dan laju pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045, dengan kondisi seperti saat ini (*business as usual* - BAU), maka akan terjadi defisit beras pada tahun 2025. Simulasi produksi dan konsumsi beras di Kota Bukittinggi sampai tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras Kota Bukittinggi

		persen/tahun		Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun	
Asumsi Awal		0.80		66.09	1.60	1.59	
Perubahan Asumsi		0.70%		75.00	1.20	2.00	
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	375.01	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2030	365.68	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2035	356.35	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2040	347.01	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2045	337.68	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95
	2025	9,674.19	9,674.19	9,624.86	9,624.86	9,624.86	9,624.86
	2030	10,068.91	10,068.91	9,966.48	9,966.48	9,966.48	9,966.48
	2035	10,479.74	10,068.91	9,966.48	9,966.48	9,966.48	9,966.48
	2040	10,907.32	10,907.32	10,686.52	10,686.52	10,686.52	10,686.52
	2045	11,352.35	11,352.35	11,065.83	11,065.83	11,065.83	11,065.83
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	-8,019.64	-8,324.16	-8,274.82	-8,092.82	-5,686.60	-5,290.91
	2030	-8,455.53	-8,718.88	-8,616.44	-8,434.44	-5,942.82	-5,547.12
	2035	-8,907.53	-9,129.70	-8,970.19	-8,788.18	-6,208.13	-5,812.43
	2040	-9,376.29	-9,557.28	-9,336.49	-9,154.48	-6,482.85	-6,087.16
	2045	-9,862.49	-10,002.32	-9,715.79	-9,533.78	-6,767.33	-6,371.63

Sumber: Analisis, 2023

3. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem

Profil daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah daya dukung dan daya dukung berbasis jasa lingkungan. Ada 20 (dua puluh) jenis jasa lingkungan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jasa, yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Dari Kajian Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2021, dapat diilustrasikan bahwa: Dari 20 jasa ekosistem, rata-rata daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah, kecuali untuk jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, pengaturan pemurnian air, pengaturan penguraian limbah, dan jasa budaya dan jasa pendukung lainnya.

Tabel 4. Ringkasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2021

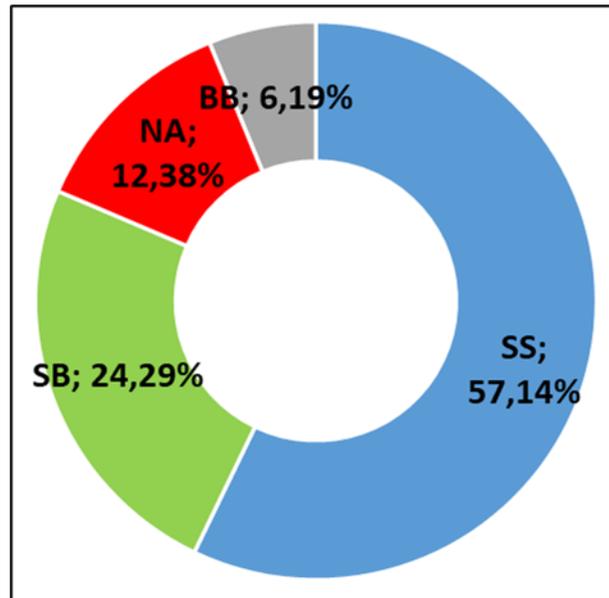
No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah



1	Penyediaan Pangan	29,44%	7,5%	63,02%
2	Penyediaan Air Bersih	32,17%	21,9%	45,98%
3	Penyediaan Serat	14,85%	21,8%	63,37%
4	Penyediaan Bahan Bakar	12,94%	6,1%	81,01%
5	Penyediaan Sumber Daya Genetik	18,58%	29,2%	52,19%
6	Pengaturan Iklim	12,54%	0,4%	87,06%
7	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	27,32%	46,8%	25,87%
8	Pengaturan Perlindungan Bencana	26,75%	20,1%	53,12%
9	Pengaturan Pemurnian Air	26,97%	47,2%	25,87%
10	Pengaturan Penguraian Limbah	16,92%	57,0%	26,09%
11	Pengaturan Kualitas Udara	4,31%	8,6%	87,06%
12	Pengaturan Penyerbukan Alami	23,80%	13,3%	62,92%
13	Pengaturan Pengendalian Hama	12,54%	17,4%	70,06%
14	Ekosistem Tempat Tinggal	45,62%	19,7%	34,69%
15	Ekosistem Rekreasi	45,62%	19,7%	34,69%
16	Ekosistem Estetika (Alam)	17,14%	57,0%	25,87%
17	Pembentukan Tanah	20,52%	53,4%	26,09%
18	Siklus Hara	4,13%	69,8%	26,09%
19	Produksi Primer	20,70%	53,2%	26,09%
20	Biodiversitas	10,36%	63,8%	25,87%

4. Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis data, dari 210 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, didapatkan bahwa indikator TPB di Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 57,14% (120 dari total 210 indikator), sedangkan untuk kategori SB dan NA berturut-turut adalah 24,29% dan 12,38%. Untuk indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB) adalah 6,19%. Hasil capaian pelaksanaan TPB Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah. Terdapat 120 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 20 indikator seperti terlihat pada Tabel 4. Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini juga merupakan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 10 indikator.



Keterangan:

- SS: **Sudah** Terlaksana dan **Sudah** Mencapai Target
- SB: **Sudah** Terlaksana Tetapi **Belum** Mencapai Target
- NA: **Sudah** Terlaksana Tetapi **Belum** Ada Data
- BB: **Belum** Terlaksana dan **Belum** Mencapai Target

Gambar 8. Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi

Tabel 5. Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Bukittinggi

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	25	16	8	0	1
2	Tanpa Kelaparan	11	9	0	2	0
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	20	10	4	0
4	Pendidikan berkualitas	13	9	3	1	0
5	Kesetaraan gender	14	9	5	0	0
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	6	3	1	7
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	7	5	0
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	9	6	2	1	0
10	Mengurangi kesenjangan	6	5	0	1	0
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	15	11	2	0	2
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	1		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1	1	
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	9	4	8	

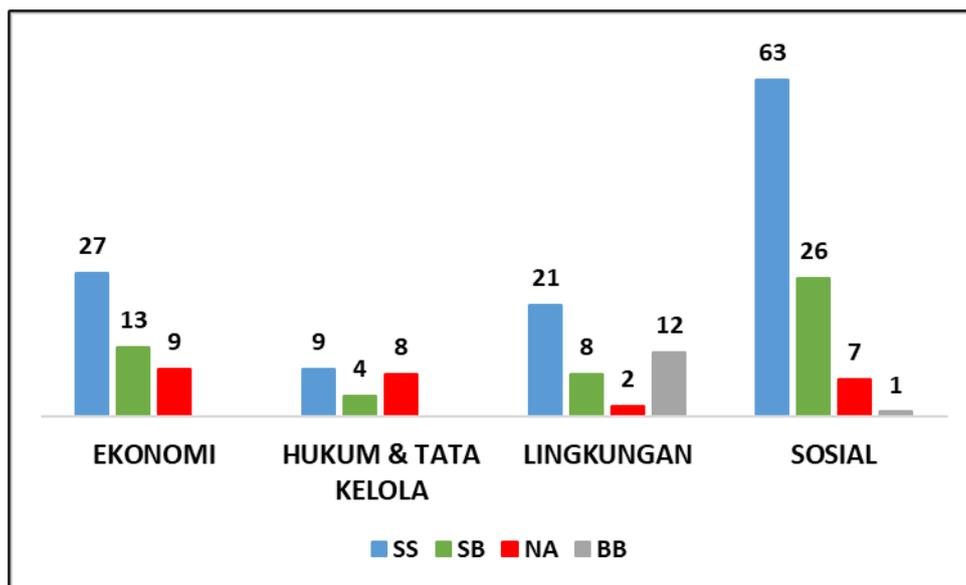


17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	9	4	2	
Total		210	120	51	26	13
Persentase			57,1%	24,3%	12,4%	6,2%

Menurut pilar, capaian TPB Kota Bukittinggi terlihat pada Tabel 4. Pilar dengan capaian tertinggi adalah pilar sosial (63 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (27 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (21 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi juga berada pada pilar sosial dengan 26 indikator dengan capaian SB. Sedangkan, kategori NA tertinggi berada pada pilar ekonomi dengan 9 indikator dengan capaian NA.

Tabel 6. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Ekonomi	49	27	13	9	
2	Hukum & tata kelola	21	9	4	8	
3	Lingkungan	43	21	8	2	12
4	Sosial	97	63	26	7	1
Total		210	120	51	26	13
Persentase			57,1%	24,3%	12,4%	6,2%



Gambar 9. Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi Berdasarkan Pilar

5. Capaian Indikator Tiap OPD

Evaluasi TPB menurut opd/unit/badan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 7. Dinas Kesehatan merupakan OPD dengan jumlah indikator TPB paling



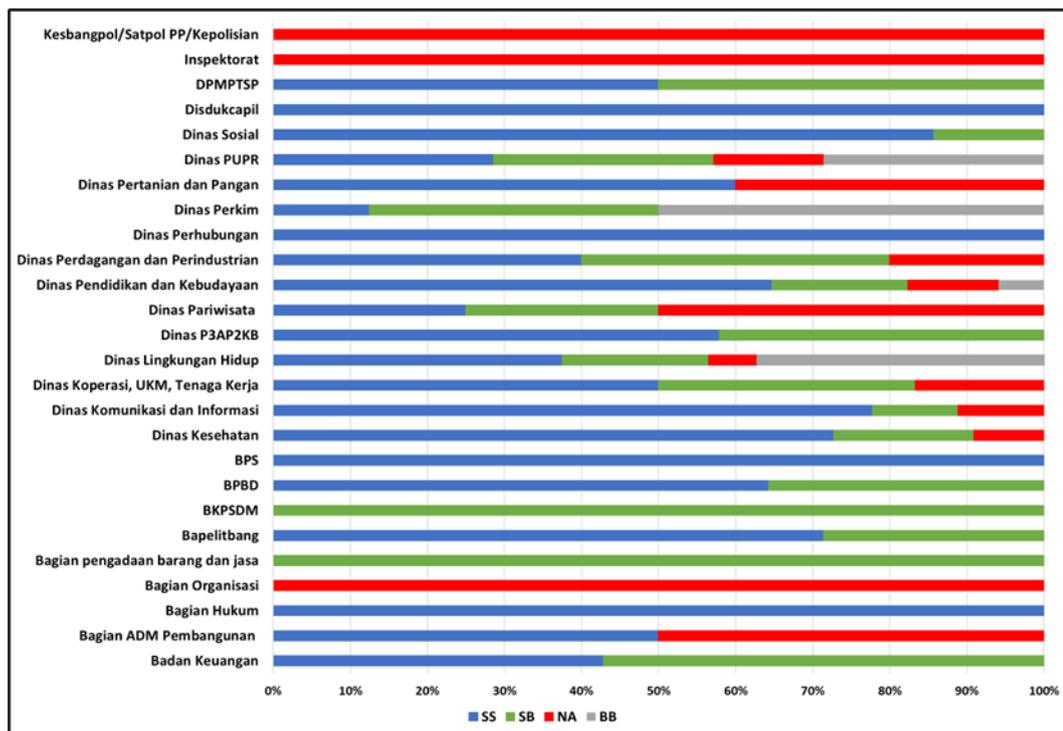
banyak yakni sebanyak 44 indikator. Dari indikator yang menjadi urusan Dinas Kesehatan tersebut, indikator yang sudah mencapai target nasional sebesar 73% atau sebanyak 32 indikator, dan indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yakni sebanyak 8 indikator (18%), dan terdapat 4 (9%) indikator yang belum memiliki data. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan OPD peringkat kedua yang memiliki indikator terbanyak, yaitu sebanyak 19 indikator. Untuk Dinas P3AP2KB, dari 19 indikator ini ada 11 indikator (58%) yang sudah tercapai, 8 indikator (42%) yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai.

Tabel 7. Capaian Indikator TPB Pada OPD/Badan/Unit Kota Bukittinggi

No	Nama OPD/Badan/Unit Leading Sector	Jumlah Indikator	Capaian							
			SS	%	SB	%	NA	%	BB	%
1	Bagian Administrasi Pembangunan	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
2	Bagian Hukum	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Bagian Organisasi	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	7	5	71%	2	29%	0	0%	0	0%
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	9	64%	5	36%	0	0%	0	0%
8	Badan Keuangan Daerah	7	3	43%	4	57%	0	0%	0	0%
9	Badan Pusat Statistik	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Dinas Kesehatan	44	32	73%	8	18%	4	9%	0	0%
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	7	78%	1	11%	1	11%	0	0%
12	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	12	6	50%	4	33%	2	17%	0	0%
13	Dinas Lingkungan Hidup	16	6	38%	3	19%	1	6%	6	38%
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	19	11	58%	8	42%	0	0%	0	0%
15	Dinas Pariwisata	4	1	25%	1	25%	2	50%	0	0%
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	11	65%	3	18%	2	12%	1	6%
17	Dinas Perhubungan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	%
18	Dinas Pertanian dan Pangan	5	3	60%	0	0%	2	40%	0	0%
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8	1	12%	3	38%	0	0%	4	50%



20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	2	29%	2	29%	1	14%	2	29%
21	Dinas Sosial	7	6	86%	1	14%	0	0%	0	0%
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
24	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
25	Inspektorat	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/ Satpol PP/ Kepolisian	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
Grand Total		210	120		51		26		13	



Gambar 10. Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Pada OPD/Unit/Badan Berwenang di Kota Bukittinggi

6. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Penetapan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilihat berdasarkan keterkaitan isu hasil konsultasi publik, kondisi lingkungan (Muatan KLHS), ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan isu-isu dari dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kota Bukittinggi. Berdasarkan isu-isu tersebut di atas maka dilakukan crosscutting antar isu dengan TPB dan didapatkan TPB prioritas.



Tabel 8. Peringkat TPB Prioritas Kota Bukittinggi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rangking Isu					Jumlah	Ranking (Prioritas)
		KP1	GAP TPB	KARAKTERISTIK WIALAYAH (MUATAN KLHS)	RPJPD 2025-2045	RRPLH		
1	Tanpa Kemiskinan	3	8	1	1	2	15	2
2	Tanpa Kelaparan	6	12	3	5	2	28	10
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	1	6	2	5	2	16	3
4	Pendidikan berkualitas	2	10	3	4	3	22	8
5	Kesetaraan gender	5	8	6	9	6	34	12
6	Air bersih dan sanitasi layak	3	2	1	3	2	11	1
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	6	3	3	3	4	19	6
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	6	9	5	6	5	31	11
10	Mengurangi kesenjangan	5	13	4	8	4	34	12
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	1	11	1	3	2	18	5
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	6	1	4	8	4	23	9
13	Penanganan perubahan iklim	4	5	1	7	1	18	5
15	Ekosistem Darat	4	5	1	6	1	17	4
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	5	4	5	2	5	21	7
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	5	7	4	1	5	22	8



Berdasarkan hasil analisa tersebut urutan TPB Prioritas di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
2. TPB 1: Tanpa Kemiskinan
3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 15: Ekosistem Darat
5. TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim
6. TPB 11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Kemudian, untuk Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Tingkat Pelayanan Air Bersih Masih Rendah
3. Semakin Maraknya Penyakit Sosial (LGBT, Kenakalan remaja, dll)
4. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan

7. Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Setelah dilakukan serangkaian analisis pada pembahasan sebelumnya, dari 210 indikator yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, didapatkan indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) sebanyak 120 indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebanyak 51 indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum ada data (NA) sebanyak 26 indikator, dan indikator yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB) sebanyak 13 indikator. Untuk pencapaian target, tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Akan tetapi, ada beberapa indikator yang tidak akan tercapai, apabila hanya melanjutkan kebijakan dan program yang telah berjalan selama ini. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan program baru yang memerlukan inovasi atau memerlukan upaya tambahan untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2030. Pada tabel dibawah ini dibawah ini diberikan beberapa gambaran skenario Pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB.



Tabel 9. Skenario Arah Kebijakan

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) keluar dari basis DTKS	1. Mengoptimalkan PPKS yang tertangani 2. Meningkatkan Persentase PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berpartisipasi 3. Meningkatkan Persentase PSKS yang berpartisipasi	1. Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKS 2. Peningkatan upaya kemandirian ekonomi bagi PPKS	1. Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis Filantropi dalam mendukung pembiayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Basnas) 2. Peningkatan Kapasitas pendamping PKH 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait validasi dan Inventarisasi Data	Dinas Sosial
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Menguatkan dukungan anggaran untuk mempertahankan cakupan kepesertaan tetap pada posisi aman UHC	Mendorong kepesertaan mandiri bagi warga mampu dan kepesertaan bagi tenaga kerja perusahaan	Penguatan regulasi untuk mendorong kepesertaan mandiri dan kepesertaan tenaga kerja perusahaan	Pemberian reward dan punishment bagi perusahaan yang mendaftarkan/tidak tenaga kerjanya	Dinas Kesehatan, Disnaker, Kecamatan



NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<p>1. Mengoptimalkan sistem pembiayaan iuran BPJS TK bagi pekerja rentan di Kota Bukittinggi</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan kepada perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS TK</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Kepatuhan BPJS TK</p>	<p>1. Mengembangkan regulasi yang mengatur tentang kepesertaan tenaga kerja ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja</p> <p>2. Mengembangkan persyaratan tambahan terkait BPJS TK bagi pengesahan peraturan perusahaan</p> <p>3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS TK pada perusahaan</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dengan filantropi terkait pembiayaan BPJS TK</p>	<p>Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya BPJS TK</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya BPJS TK</p> <p>2. Pengembangan insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang sudah/belum memenuhi ketentuan pengesahan perusahaan.</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dengan DPMPSTSP untuk menjadikan kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja sebagai salah satu syarat dalam pengurusan izin perusahaan</p>	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja



NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak	1. Memberikan peningkatan Kapasitas perekonomian bagi penyandang disabilitas 2. Meningkatkan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas	Peningkatan sarana dan prasarana umum bagi penyandang disabilitas	1. Peningkatan keberantaraan akses disabilitas terhadap permodalan dan jaminan kredit modal, kemitraan, pemanfaatan teknologi digital, pasar dan manajemen usaha 2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan	Dinas Sosial
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat pada seluruh faskes baik FKTP maupun rujukan yang terakreditasi paripurna dalam memberikan pelayanan persalinan di faskes		1. Penguatan quality control standar layanan kesehatan pada seluruh FKTP dan Rujukan	1. Penguatan kerja sama dengan seluruh FKTP dan Rujukan, 2. Peningkatan fasilitasi bagi seluruh faskes dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatkan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat terkat dan lintas program dalam pencapaian target imunisasi	Meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat baik peserta didik maupun orang tua akan pentingnya imunisasi, Meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan institusi baik formal maupun non formal dalam menyukseskan program imunisasi	Penguatan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan terpadu	Penguatan koordinasi program imunisasi sebagai kegiatan bersama antar lembaga/institusi pemerintah ataupun swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan		a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan b. Pengembangan sumber pembiayaan pendidikan berbasis filantropi untuk anak usia sekolah c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan muatan kurikulum berbasis agama		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan		a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan b. Pengembangan sumber pembiayaan pendidikan berbasis filantropi untuk anak usia sekolah c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan muatan kurikulum berbasis agama		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	1. Mengembangkan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran umur 0 sd 17 tahun 2. Mengembangkan layanan terintegrasi penerbitan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan se Kota Bukittinggi 3. Meningkatkan azas stelsel aktif dalam penerbitan akta kelahiran umur 0 sd 17 tahun	Mengembangkan aplikasi layanan digital penerbitan akta kelahiran	1. Pengembangan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran 2. Pengembangan layanan terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan se-Kota Bukittinggi 3. Optimalisasi pelayanan dengan azas stelsel aktif	Pengembangan layanan adminduk digital	Disdukcapil

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		Mempertahankan kemampuan masyarakat yang sudah teraliri listrik untuk memenuhi kebutuhannya	Mengoptimalkan pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan mematikan listrik disaat tidak berada dirumah		Dinas Sosial
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.					BPBD

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1. Meningkatkan Database korban bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban pasca Bencana 2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Korban Bencana tepat waktu dan tepat sasaran	Mengoptimalkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di setiap kelurahan	Peningkatan kapasitas untuk masyarakat KSB	1. Pengembangan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim 3. Peningkatan koordinasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan berbagai pihak	Dinas Sosial

NO. TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan dampak dari suatu bencana	Mengoptimalkan SDM Tagana untuk penanggulangan pasca bencana	Peningkatan efektifitas perlindungan korban bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Dinas Sosial

Untuk lebih jelasnya, keseluruhan skenario arah kebijakan, dapat dilihat pada BAB VI Dokumen KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030.



Rekomendasi Berdasarkan Isu PB Strategis

Selain rekomendasi arah kebijakan dan program pada tiap indikatornya, dibutuhkan rekomendasi khusus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Bukittinggi dalam KLHS RPJMD 2025-2030. Rekomendasi ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rekomendasi Khusus Isu PB Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 Kota Bukittinggi

Nama TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi	
		Arah Kebijakan	Indikasi Program
TPB 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1. Mengembangkan Desentralisasi pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan lembaga pengelolaan sampah pada tingkat kelurahan (termasuk transfer anggaran) 2. Peningkatan kapasitas SDM lokal dalam pengelolaan sampah
		2. Mengembangkan pemanfaatan sampah untuk energi, pupuk kompos, dan pakan ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan teknologi pengelolaan sampah plastik dan daun untuk bahan bakar minyak, briket arang, dan kompos 2. Peningkatan Informasi, praktek terbaik dan kampanye ulang sampah (maggot, eco-cyber, dll)
		3. Meningkatkan pemahaman publik tentang tanggung jawab individu dalam pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan paradigma pengelolaan sampah pada sumber daya manusia 2. Pengembangan pola konsumsi minim sampah (diet plastik, paperless administration system, tumbler, dll)
TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Rendahnya Tingkat Pelayanan Penyediaan Air Bersih	1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengelolaan sumber air minum bersih dengan daerah tetangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembiayaan jasa ekosistem oleh hilir terhadap hulu 2. Peningkatan kualitas tutupan vegetasi pada daerah sumber mata air 3. Pengembangan regulasi pemanfaatan air tanah dan air permukaan
		2. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi penyediaan air bersih 2. Pengintegrasian penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah domestik



Nama TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi	
		Arah Kebijakan	Indikasi Program
TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; TPB 4 Pendidikan Berkualitas; TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh	Semakin maraknya penyakit sosial (LGBT, Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja, Kekerasan)	1. Meningkatkan partisipasi orang tua, tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh adat dalam pengendalian penyakit sosial	1. Peningkatan partisipasi lokal dalam pengenalan dini, dan pengawasan intensif potensi penyimpangan perilaku sosial 2. Intensifikasi pendidikan agama dalam keluarga dan masyarakat tentang dampak perilaku sosial menyimpang.
		2. Meningkatkan ruang publik untuk pengembangan minat dan bakat masyarakat. (Olahraga, seni budaya, dll)	1. Peningkatan Informasi persuasive untuk pengendalian penyakit sosial 2. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan ruang penampilan eksistensi remaja.
TPB 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas drainase, instalasi pengelolaan Limbah dan ruang terbuka hijau	1. Pengembangan bertahap sistem drainase terpadu (ecodrain); 2. Pengembangan regulasi pengelolaan air limbah domestik dan industri; 3. Peningkatan luas dan kualitas ruang terbuka hijau, biopori, sumur resapan, dll.
		2. Mengembangkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab individu dalam pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan partisipasi ulama dan tokoh pendidikan tentang keterkaitan pengelolaan lingkungan sebagai ibadah. 2. Peningkatan kualitas Informasi dan edukasi pentingnya pengelolaan lingkungan 3. Pengintegrasian RPPLH ke dalam dokumen perencanaan tahunan